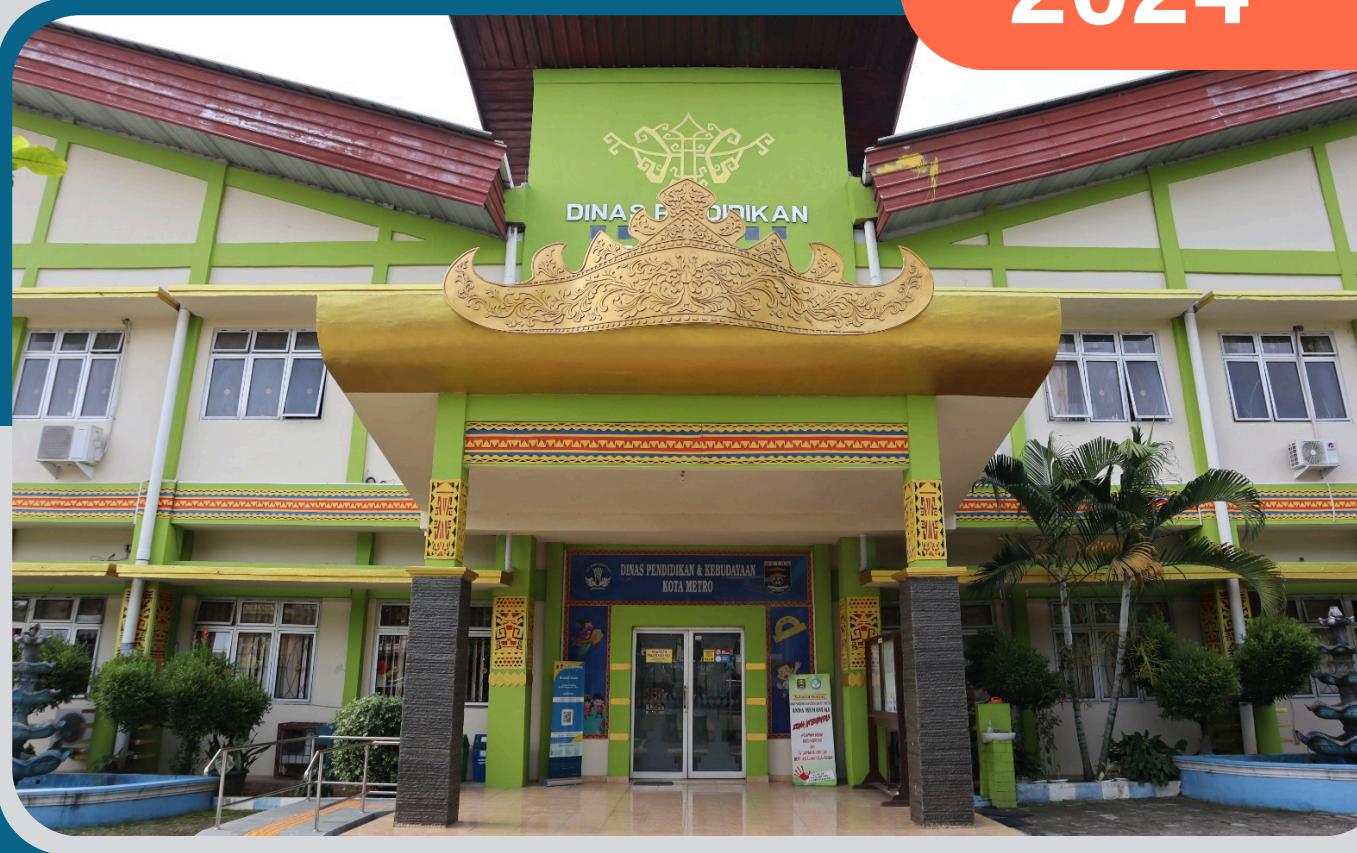




LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (PERBAIKAN)

2024



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO

JL. Kihajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur
Telp. 0725 (41549), Fax. 0725 (41549)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

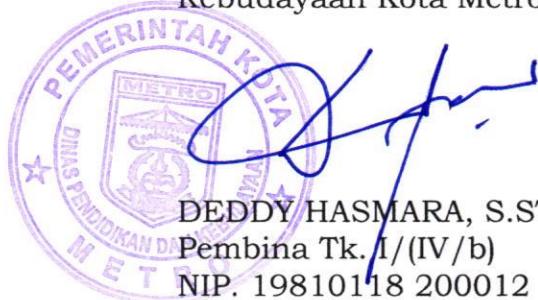
Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus ditingkatkan, akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintahan daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan, pemangku kebijakan, dukungan instansi lain, dan masyarakat peduli sehingga pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendukung penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Metro.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan dan bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Tahun 2024

peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi dan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Metro untuk mewujudkan Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya.

Metro, 4 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Metro



DEDDY HASMARA, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP. 19810118 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Profil Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	1
1.2 Isu Strategis.....	16
1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan	17
1.4 Sumber Daya Manusia.....	19
BAB II Perencanaan Kinerja	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Tujuan dan Sasaran	22
2.3 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	23
2.4 Penetapan Kinerja	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	39
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	53
BAB IV Penutup	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Tindak Lanjut	56
Lampiran	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja	23
Tabel 2.3 Penetapan Kinerja	24
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja	40
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama	41
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2024	42
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) beberapa tahun terakhir	44
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	45
Tabel 3.6 Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap Standar Provinsi dan Nasional	46
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	17
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara umum, Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan unsur Pemerintah Kota Metro yang diberi tanggung jawab dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan sejumlah fungsi yang

mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun fungsi tersebut meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh unsur sekretariat, bidang-bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertariat;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.:

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara optimal, berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi:

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;

- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Koordinasi pendataan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal, Sekretariat terdiri dari:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dinas, keprotokolan serta pelayanan pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian; Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan Administrasi Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (a) Menyusun rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) Menyiapkan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- (c) Menyiapkan perencanaan dan formasi pegawai;
- (d) Menyiapkan pengembangan pegawai;
- (e) Menyiapkan urusan mutasi kepegawaian;
- (f) Melaksanakan pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian;
- (g) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- (h) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- (i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;

- (j) Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- d) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.
- i) Melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal.

Rincian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a) Pendataan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c) Penyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- g) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- h) Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :

- 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- 2) Kelompak Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan peloparan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- d) Membuat pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan bahan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c) Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- d) Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

- e) Penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- f) Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- g) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- h) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;
- i) Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- j) Penyusunan bahan pengelolaan museum;
- k) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Seksi Kesenian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Seksi kesenian dimppin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 2) Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- 3) Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- 4) Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- 5) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- 6) Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- b) Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- d) Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten/Kota;
- f) Mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal;
- g) Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- h) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

- i) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Kesenian; dan
- 2) Kelompok jabatan funsional.

Seksi Kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Rincian tugas tenaga kesenian sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 2) Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- 3) Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- 4) Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- 5) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- 6) Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.2 Isu Strategis

Bagian ini mendeskripsikan posisi strategis Perangkat Daerah dalam memetakan permasalahan dalam pembangunan yang bersifat menjawab isu strategis, meliputi cara mengatasi, dengan hambatan dan tantangan. Uraian dimaksud agar selaras dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024 beserta Perubahannya.

Pembangunan Kota Metro saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan, yakni:

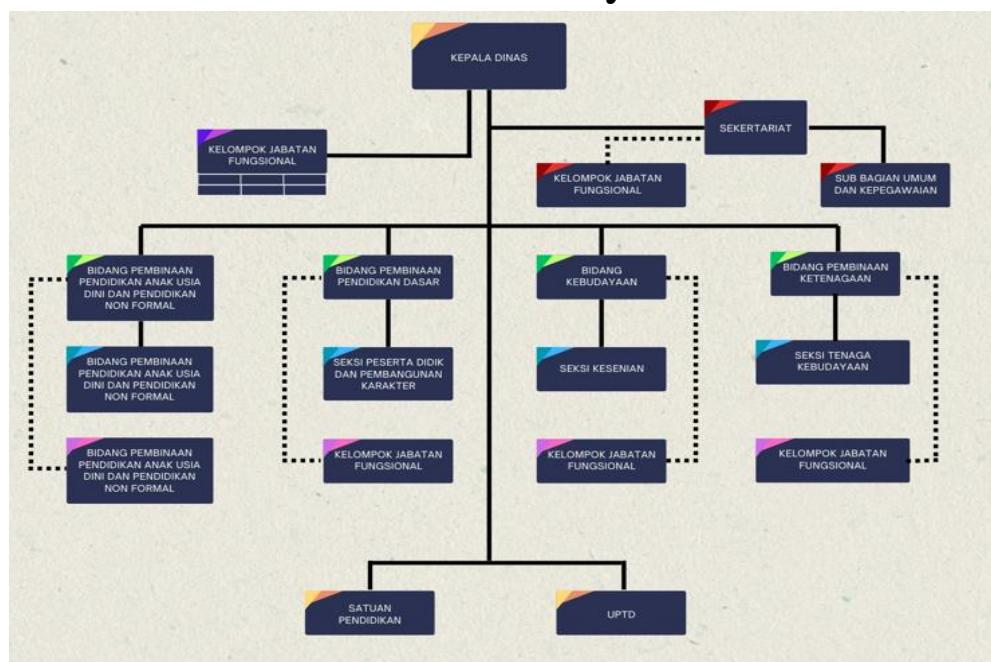
- 1) Belum adanya sistem pemantauan standar kualitas sekolah;
- 2) Masih adanya sarana prasarana sekolah yang belum sesuai standar;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses mengajar;
- 4) Masih adanya kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik di bawah standar;
- 5) Masih adanya tenaga pendidik dengan pendapatan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL);
- 6) Belum optimalnya penanaman nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan;

- 7) Perlunya pengembangan literasi digital dalam mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila;
- 8) Masih terbatasnya layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas.

1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OSTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai berikut :

**Gambar 1.3
Susunan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro**



Susunan organisasi pada gambar 1 secara garis besar terdiri atas:

- Kepala Dinas secara langsung membawahi :
- Sekretariat, yang mengelola administrasi dan urusan umum, serta membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - Seksi Kesenian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - Seksi Tenaga Kebudayaan
 - Kelomok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional Umum, yang berada langsung di bawah Kepala Dinas dan mendukung tugas-tugas lintas bidang
- Satuan Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang juga berada langsung di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan secara operasional.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana terinci dalam tabel Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian									Gol				
		PNS			PPPK			Total			I	II	III	IV	IX
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total					
1	S2	6	16	22	-	-	-	6	16	22	-	-	4	18	-
2	S1	8	17	25	-	2	2	8	19	27	-	-	23	2	2
3	D3	2	5	7	-	-	-	2	5	7	-	4	3	-	-
4	D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SMA	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	3	1	-	-
7	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20	38	58	-	2	2	20	40	60	-	7	31	20	2

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jenjang pendidikan S-2 sebanyak 22 orang dengan golongan III sebanyak 4 orang, golongan IV sebanyak 18 orang. Jenjang pendidikan S-1 sebanyak 27 orang, dengan golongan III sebanyak 23 orang, golongan IV sebanyak 2 orang. Jenjang pendidikan D-3 sebanyak 7 orang, dengan golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 3 orang. Jenjang pendidikan SMA sebanyak 4 orang,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Tahun 2024

dengan golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 1 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selaku penanggung jawab di bidang pendidikan di Kota Metro memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2024. Target kinerja tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun.

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berorientasi pada hasil yang dicapai pada waktu lima tahun 2021-2026. Memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang timbul pada rentang waktu tersebut. Penetapan jangka waktu tersebut berhubungan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dibuat pada masa jabatannya dengan akuntabilitas sehingga penyelenggaraan daerah akan menjadi akuntabel.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Misi Ke-1 Pemerintah Kota Metro yaitu **"Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan"**. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro, tentunya perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak dan didukung dengan penerapan nilai yang sesuai dan usaha-usahanya. Tata nilai merupakan dasar dan arah bagi perilaku dan sikap seluruh pegawai dalam pelaksaaan tugasnya, menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan pelayanan prima pendidikan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Laporan kinerja Instansi Pemerintah, berikut ini ditampilkan tabel tujuan, sasaran strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.
2	Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro 2021-2026

2.3 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga kondisi kinerja pada periode RPJMD 2021-2026 dapat tergambar. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun berjalan.

Sesuai dengan tujuan “Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan”, maka Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	
			- SD/MI/Paket A	99,80
			- SMP/MTs/Paket B	95,50

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021-2026

2.4 Penetapan Kinerja

Tabel 2.4.
Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelola Keuangan	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1693 org/bln
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji	146 Org / Bln
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1 Laporan

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100 %
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Org
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah	20 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan batang penunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/ MI/ Paket A - SMP/ MTs / Paket B - PAUD Usia 3-6 tahun	

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	100%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16838 Peserta Didik
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima biaya personil peserta didik	10153 peserta didik
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	360 Peserta Didik
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	65 Satuan Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2925 Peserta Didik

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140 Org
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	526 Org
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	2 Ruang
	Rehabilitas Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi	1 Ruang
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Org
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
	Bimbingan Teknis Pelatihan,dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan,dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300 Org
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 org

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 komunitas
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	1 Ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	4 unit
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6292 Peserta didik
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Bantuan KMC	400 Peserta Didik
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1350 Peserta Didik
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54 Org
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	402 Org
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27 Satuan Pendidikan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Org
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	300 Org

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Org
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 komunitas
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%
	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit
	Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	1 unit
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	7 Paket
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	478 Peserta Didik
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	477 Peserta Didik
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6017 Peserta Didik

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	63 Orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	641 Orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	124 Satuan Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 orang
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 komunitas
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	120 Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	267 Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	35 Orang

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	489 Buku
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	20 Org
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang terdata	
	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Cakupan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	1 Dokumen

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Laporan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga yang terdata	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	100%
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	100%
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	100%
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	100%
	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra	100 Orang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (KEBUDAYAAN)		

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYA-AN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya	3 Obyek
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Obyek
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Kesenianan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	100%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan	2 Obyek
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan lembaga adat	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Lembaga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	2 Kegiatan
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Kesenian masyarakat Pelakunya	100%
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	90 Org

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output Kinerja (Satuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	28 Org
	Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	75 Orang
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Obyek
	Perlindungan Cagar Budaya	Rehab Bangunan dokter swoning	1 Obyek
	Pengembangan Cagar Budaya	Penyediaan Sarana Haritage Tour bus	1 Obyek
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Penyediaan Ruang Kreatif dan Ruang Edukasi Publik (dokter swoning)	1 Obyek
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	1 Kegiatan
	Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	100%
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	81 Org

Sumber data : Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024

Penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan. Penetapan kinerja yang telah disusun, yang mencakup indikator seperti jumlah dokumen perencanaan, laporan evaluasi kinerja, dan administrasi keuangan, yang berfungsi sebagai alat ukur untuk

menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai. Ini juga menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih efektif dan terarah, memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal.

Indikator-indikator kinerja yang bersifat kuantitatif, seperti jumlah dokumen RKA-SKPD, serta kegiatan yang mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan jumlah penerima bantuan pendidikan, mencerminkan upaya untuk mencapai target yang terukur dan memberikan gambaran jelas mengenai capaian yang telah diperoleh. Sementara itu, aspek kualitatif berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelestarian kebudayaan, yang mencakup kurikulum, fasilitas pendidikan, serta keberhasilan dalam menjaga keberagaman budaya lokal dan penguatan identitas budaya daerah.

Perencanaan yang matang, yang tercermin dalam penyusunan berbagai dokumen kegiatan, juga menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan distribusi anggaran yang tepat guna untuk mendukung tujuan ini. Selain itu, penetapan kinerja yang baik mencakup evaluasi yang sistematis, yang memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang masih dihadapi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi berkala ini tidak hanya mengukur pencapaian program, tetapi juga dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam penetapan kinerja. Dengan adanya pelaporan yang terbuka dan jelas mengenai pencapaian kinerja, masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan dampak kebijakan, dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi, sehingga meningkatkan kredibilitas serta efektivitas program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat identitas budaya daerah melalui pendidikan yang relevan dan berkelanjutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dilaksanakan secara sistematis berdasarkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam

mewujudkan visi, misi, serta sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Setiap target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian serta celah kinerja (performance gap) yang muncul. Penilaian dilakukan menggunakan skala capaian kinerja sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	90 % - < 100 %	Sangat Baik
3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Metro dan APBN.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (**performance plan**). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (**performance gap**). Selisih yang timbul akan dianalisis

guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (***performance improvement***).

Tabel 3.2. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Angka Partisipasi Murni (APM)	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
	- SD/MI/Paket A (Siswa asal Kota Metro)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
	- SMP/MTs/Paket B (Siswa asal Kota Metro)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(3)				
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1	Angka Partisipasi Murni (APM)				
			- SD/MI/Paket A	%	99,80	99,86	100,06
			- SMP/MTs/Paket B	%	95,50	95,86	100,38

Sumber data : Dapodik, Emis/Simpatika & DKB

Tabel di atas menggambarkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yaitu satu Indikator Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan

penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Dengan kriteria makin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang Pendidikan tertentu. Untuk nilai ideal APM yaitu 100%, serta kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Dari hasil penilaian kinerja, hal yang dapat disampaikan adalah :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	SD/MI/Paket A	%	99,80	99,86	100,06
	SMP/MTs/Paket B	%	95,50	95,86	100,38

Sumber data : Dapodik, Emis/Simpatika & DKB

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2024 sebesar 99,86%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 99,80%, dengan capaian kinerja sebesar 100,06%. Perhitungan APM dilakukan dengan membagi jumlah siswa usia 7-12 tahun asal Kota Metro jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 17.936 dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 17.962, kemudian dikalikan 100. Dengan demikian, pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa target partisipasi pendidikan di jenjang tersebut telah terlampaui dengan baik.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 sebesar 95,86%, melebihi

target yang telah ditetapkan sebesar 95,50%, dengan capaian kinerja sebesar 100,38%. Perhitungan APM dilakukan dengan membagi jumlah siswa usia 13-15 tahun asal Kota Metro jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 8.925 dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 9.310, kemudian dikalikan 100. Dengan demikian, pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa target partisipasi pendidikan di jenjang tersebut telah terlampaui dengan baik.

Capain Angka Partisipasi Murni (APM) dapat mencapat target yang telah ditentukan karena adanya program-program pendukung yaitu :

- (a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - (b) Program Pengelolaan Pendidikan
 - (c) Program Pengembangan Kurikulum
 - (d) Program Pendidikan dan Kependidikan
 - (e) Program Pengendalian Perizinan
 - (f) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - (g) Program Pengembangan Kebudayaan
 - (h) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - (i) Program Pembinaan Sejarah
 - (j) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - (k) Program Pengeloaan Permuseuman
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/Paket A, terlihat bahwa tingkat partisipasi peserta didik berada pada kisaran sangat tinggi, yaitu di atas 99% selama

periode 2021–2024. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kota Metro telah bersekolah pada jenjang yang sesuai, dengan capaian realisasi yang relatif stabil dan konsisten mendekati 100%. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan dasar serta efektivitas kebijakan wajib belajar sembilan tahun.

Sementara itu, APM jenjang SMP/MTs/Paket B menunjukkan capaian yang cukup tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan jenjang SD/MI. Selama periode 2021–2024, APM SMP/MTs berada pada rentang 94,53% hingga 95,98%, dengan fluktuasi tipis setiap tahunnya. Capaian ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah menengah pertama telah bersekolah sesuai jenjang, meskipun masih terdapat sebagian kecil anak usia SMP/MTs yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan ke depan, khususnya terkait peningkatan akses pendidikan menengah dan pencegahan angka putus sekolah.

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Angka Partisipasi Murni (APM)				
- SD/MI/ Paket A	100,01	99,63	99,65	99,86
- SMP/MTs/ Paket B	95,98	94,53	95,35	95,86

Sumber data : Dapodik, Emis/Simpatika & DKB

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat ketercapaian akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Kota Metro. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021–2026, telah ditetapkan target jangka menengah yang menjadi acuan pencapaian kinerja hingga tahun 2026. Untuk mengetahui perkembangan capaian hingga saat ini, berikut disajikan perbandingan realisasi APM Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra.

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2026	Selisih
Angka Partisipasi Murni (APM)			
- SD/MI/ Paket A	99,86	100,00	0,14
- SMP/MTs/ Paket B	95,86	96,00	0,14

Sumber : Renstra Disdikbud 2021-2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian APM pada jenjang SD/MI/Paket A Tahun 2024 telah mencapai 99,86 persen atau hanya berselisih 0,14 poin dari target tahun 2026 sebesar 100 persen. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/Paket B capaian APM tercatat sebesar 95,86 persen, juga hanya terpaut 0,14 poin dari target jangka menengah 96

persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian APM Kota Metro berada dalam perkebangan yang sangat positif dan diperkirakan dapat memenuhi bahkan melampaui target Renstra pada tahun 2026 apabila konsistensi program dan kebijakan peningkatan akses pendidikan tetap dipertahankan.

d. Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap Standar Provinsi dan Nasional

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan gambaran capaian yang relatif baik meskipun masih terdapat kesenjangan apabila dibandingkan dengan standar nasional. APM merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Perbandingan capaian kinerja Kota Metro dengan standar nasional ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap Standar Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Standar Nasional (%)	Realisasi 2024	Capaian Tertinggi Nasional
Angka Partisipasi Murni (APM)			
- SD/MI/ Paket A	97,94	98,33 (Peringkat 16 Nasional)	99,43 (DI Yogyakarta Peringkat 1 Nasional)
- SMP/MTs/ Paket B	81,73	81,40 (Peringkat 15 Nasional)	90,14 (DI Yogyakarta Peringkat 1 Nasional)

Berdasarkan Tabel 3.5, APM Kota Metro pada jenjang SD/MI/Paket A lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian ini menempatkan Kota Metro pada peringkat ke-16 nasional, meskipun masih berada di bawah capaian tertinggi nasional yang diraih oleh DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Metro sudah sangat baik dan relatif setara dengan daerah terbaik nasional.

Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, capaian APM Kota Metro tahun 2024, sedikit di bawah rata-rata nasional dan cukup jauh tertinggal dari capaian tertinggi nasional yang juga diraih oleh DI Yogyakarta. Meskipun menempati peringkat ke-15 nasional, capaian ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat menengah pertama.

Secara umum, capaian APM Kota Metro memperlihatkan bahwa akses pendidikan dasar telah terjaga dengan baik, sementara pada jenjang menengah pertama diperlukan upaya lebih lanjut dalam menekan angka putus sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta memperluas pemerataan layanan pendidikan agar capaian kinerja dapat mendekati standar tertinggi nasional.

- e. Upaya Keberhasilan Capaian Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi untuk Peningkatan Capaian Kinerja.

Keberhasilan peningkatan capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan di Kota Metro dilakukan melalui upaya:

- 1) Melakukan pemetaan wilayah dan sebaran peserta didik untuk mengidentifikasi anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal;
- 2) Mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana dan perluasan daya tampung sekolah;
- 3) Menjalin koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar dan menengah pertama;
- 4) Melaksanakan program intervensi khusus seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;
- 5) Meningkatkan akurasi dan validitas data pendidikan melalui integrasi data Dapodik dan sistem informasi daerah, guna menunjang perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan menjaga kesinambungan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah:

- 1) Meningkatkan sinergi lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak kelurahan) dalam penanganan anak putus sekolah dan rentan putus sekolah;
- 2) Mendorong pelaksanaan pendidikan alternatif seperti PKBM dan program kesetaraan untuk menjangkau peserta didik nonformal;

- 3) Mengembangkan sistem pelacakan (tracking) siswa putus sekolah untuk intervensi lanjutan;
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum pendidikan dan penguatan peran komite sekolah dalam mendukung kebijakan peningkatan partisipasi siswa;
 - 5) Mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan secara efisien untuk memperluas akses dan kualitas layanan Pendidikan.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, maka upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Monitoring dan Pendampingan Satuan Pendidikan yang bertugas memberikan pembinaan langsung kepada sekolah dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), dengan pendekatan terfokus pada wilayah dan satuan pendidikan berisiko rendah partisipasi;
- 2) Melakukan integrasi perencanaan program dan kegiatan berbasis data untuk menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran;
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan data Dapodik dan sistem informasi pendidikan daerah sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan partisipasi pendidikan;
- 4) Melaksanakan pendampingan secara terukur dan berkala kepada sekolah, memprioritaskan pemanfaatan sumber daya

- internal (pengawas sekolah, penilik, dan tenaga teknis) untuk efisiensi biaya operasional;
- 5) Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam program dukungan pendidikan, guna mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah secara langsung.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Dasar sebesar 98,33% menunjukkan keberhasilan program-program peningkatan akses pendidikan dasar yang telah dilaksanakan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah Kota Metro. Namun, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 81,40% masih menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi peserta didik pada jenjang lanjutan.

Untuk mencapai pencapaian kinerja tersebut dilakukan dengan dukungan Program dan Kegiatan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum
- Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 4) Program Pendidikan dan Kependidikan
- Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- 5) Program Pengendalian Perizinan
- Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- 6) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 7) Program Pengembangan Kebudayaan
- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 8) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 9) Program Pembinaan Sejarah
- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- 10) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 11) Program Pengelolaan Permuseuman
- Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

h. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Metro.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Pagu 2024	Realisasi 2024	Capaian
Angka Partisipasi Murni (APM)	Rp 194.437.523.554,-	Rp 192.038.604.594,-	98,77

3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebesar Rp. 194.437.523.554,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), nilai pagu tersebut merupakan pagu final setelah penetapan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai program strategis, dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 192.038.604.594,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau (98,77%) sehingga mampu memberikan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.398.918.960 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah atau (1,23%).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, antara lain:

- Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang terdampak pada kondisi dan proses pengadaan barang/jasa;

- Keterbatasan sumber daya pelaksana, terutama dalam pengelolaan program berbasis anggaran;
- Perubahan regulasi atau juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat yang terjadi di tengah tahun anggaran, sehingga memerlukan penyesuaian program atau kegiatan yang telah direncanakan;
- Rendahnya daya serap pada awal tahun anggaran, akibat proses administrasi perencanaan dan verifikasi dokumen yang memakan waktu.

Berdasarkan kendala yang dialami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan penjadwalan ulang dan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan fisik, dengan menyesuaikan kondisi riil lapangan dan kesiapan proses pengadaan barang/ jasa;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal, termasuk penugasan khusus kepada tim teknis dan penguatan kapasitas pengelola kegiatan melalui bimbingan teknis dan pendampingan;
- Melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi vertikal, guna memperoleh kejelasan dan percepatan penyesuaian terhadap regulasi atau juknis terbaru;
- Meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan perencanaan, melalui penyederhanaan alur verifikasi dan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran agar serapan dapat meningkat di awal tahun;

- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi internal secara berkala, untuk mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini dan melakukan tindak lanjut lebih cepat dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- Memanfaatkan sistem informasi manajemen berbasis digital untuk mempercepat proses pelaporan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama, khususnya pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan indikator APM jenjang SD mencapai 99,86% dan jenjang SMP mencapai 95,86%, keduanya melampaui target tahunan dan hanya terpaut tipis dari target jangka menengah dalam Renstra tahun 2026.

Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis, keterpaduan antar pemangku kepentingan, penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, serta penggunaan anggaran yang efisien, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 98,77%.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti penyesuaian regulasi, rendahnya daya serap awal tahun, dan tantangan peningkatan partisipasi di jenjang SMP, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

4.2 Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Metro menetapkan beberapa langkah tindak lanjut, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di jenjang menengah pertama melalui strategi yang lebih fokus pada wilayah dengan APM rendah;
2. Mengembangkan sistem tracking peserta didik yang rawan putus sekolah untuk dilakukan intervensi sejak dini;
3. Memperkuat integrasi lintas sektor (dinas terkait, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mendukung layanan pendidikan yang inklusif dan merata;
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan mendorong efisiensi dan perencanaan berbasis data, serta pengawasan internal yang ketat;
5. Melanjutkan pendampingan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan melalui penguatan peran pengawas sekolah, penilik, dan tim teknis daerah;
6. Melakukan inovasi dalam pelayanan pendidikan, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan kinerja;
7. Mengacu pada capaian Renstra, menetapkan strategi jangka menengah yang lebih adaptif untuk memastikan semua indikator utama dapat tercapai pada akhir periode perencanaan.
8. Dengan konsistensi pelaksanaan program dan penguatan koordinasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro optimis dapat mencapai target jangka menengah tahun 2026 dan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Metro.



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur
Kota Metro
Telp. (0725) 41549 Fax. (0725) 41549

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwandi, S.I.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. Wahdi, Sp. OG (K), M.H.

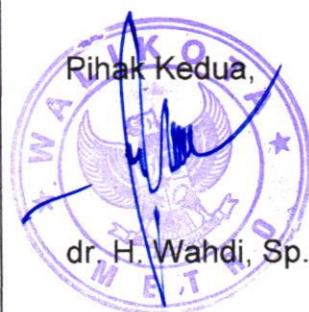
Jabatan : Wali Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024



Pihak Kedua,

dr. H. Wahdi, Sp. OG (K), M.H.



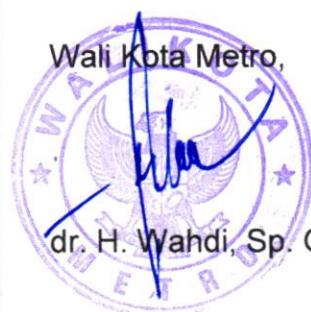
Pihak Pertama,

Suwandi, S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705122000031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) :	
		SD/MI	99,80
		SMP/MTs	95,50

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp139.789.990354	P-APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp54.006.189.200	P-APBD, APBN, & DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp25.977.600	P-APBD
4	Program Pendidikan dan Kependidikan	Rp20.000.000	P-APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp23.640.000	P-APBD
6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Rp126.055.400	P-APBD
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp580.000.000	P-APBD
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp130.000.000	P-APBD
9	Program Pembinaan Sejarah	Rp35.000.000	P-APBD
10	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp477.000.000	P-APBD
11	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp93.000.000	P-APBD



Wali Kota Metro,

dr. H. Wahdi, Sp. OG (K), M.H.



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Metro,

Suwandi, S.I.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196705122000031009